

# **PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM**

Oleh  
Veronica Laurensia Yolanda Br. Nababan  
NIM. 2105040097

## **Abstrak**

Sengketa pertanahan merupakan persoalan yang kerap muncul di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Batam. Permasalahan tersebut meliputi konflik kepemilikan tanah, sengketa warisan, tumpang tindih hak atas tanah, ketidaksesuaian batas tanah, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Batam pada periode 2021–2024, ditemukan berbagai kendala dalam proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala atau problematika yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh instansi tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris dan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka serta wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang, terutama Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 25 kasus yang dimediasi selama tahun 2021 hingga 2024, hanya 40% yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Adapun faktor penghambatnya antara lain adalah ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa atau sifat tidak mengalah, dan para pihak memilih untuk menempuh jalur hukum pada saat proses dilaksanakannya mediasi. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Batam dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai hak atas tanah, prosedur pelaksanaan mediasi, serta urgensi menyelesaikan konflik pertanahan melalui mediasi terlebih dahulu. penataan sistem informasi pertanahan juga perlu menjadi perhatian, baik dari sisi yuridis maupun fisik. Pengembangan sistem data pertanahan yang terintegrasi secara digital, terbuka, dan mudah diakses akan sangat mendukung kelancaran proses mediasi, terutama dalam hal klarifikasi dan verifikasi data terhadap objek tanah yang disengketakan.

Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Mediasi, Problematika

**PROBLEMS IN RESOLVING LAND DISPUTES THROUGH MEDIATION  
BY THE BATAM CITY LAND OFFICE**

By  
Veronica Laurensia Yolanda Br. Nababan  
NIM. 2105040097

*Abstract*

*Land disputes are issues that frequently arise in various regions of Indonesia, including in Batam City. These problems include conflicts over land ownership, inheritance disputes, overlapping land rights, boundary discrepancies, and other related matters. Based on data obtained from the Batam City Land Office for the period of 2021–2024, various obstacles were identified in resolving disputes through mediation mechanisms. This study aims to analyze the challenges or problems encountered in resolving land disputes through mediation conducted by the relevant agency. The research method used is legal research with a normative-empirical approach and descriptive qualitative techniques. Data were collected through literature studies and interviews with authorized parties, particularly the Head of the Section for Control and Dispute Resolution at the Batam City Land Office. The results show that out of 25 cases mediated from 2021 to 2024, only 40% reached a peaceful agreement. The main inhibiting factors include the absence of the disputing parties during mediation, the lack of good faith or unwillingness to compromise, and the parties' preference to pursue legal action during the mediation process. Therefore, it is necessary to improve the effectiveness of land dispute resolution through mediation at the Batam City Land Office by providing legal education to the public, especially regarding land rights, mediation procedures, and the importance of resolving land conflicts through mediation first. In addition, the organization of the land information system also needs attention, both from a juridical and physical perspective. The development of an integrated, transparent, and easily accessible digital land data system would greatly support the mediation process, particularly in the clarification and verification of disputed land objects.*

**Keywords:** *Land Dispute, Mediation, Problems*